



---

**Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pulau Morotai**

**Sri Ka'bah**

Universitas Pasifik Morotai

Email: [Srikabah3@gmail.com](mailto:Srikabah3@gmail.com)

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 26 Januari 2020

Direvisi: 29 Januari 2020

Dipublikasikan: 31 Januari 2020

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.3697458

---

**Abstract:**

*The Regent's leadership is one aspect that stands out and plays a role in the success of the development and implementation of regional government in Morotai Island Regency, because the leadership task is related to influencing subordinates to cooperate and work effectively and efficiently to achieve organizational goals. In the development process and the implementation of the regional government in Morotai Island Regency has not been running optimally, this is evident because there is no participation from cuttings holders or the community. Besides that, the capacity of apparatus in the Island of Morotai Regency is still relatively low. The purpose of his research is to study the Regent's Leadership Style in the administration of the Morotai Island Regency Government. The method used in this study is a descriptive qualitative research method using the theory of the Regent's Leadership Style in the administration of the Morotai Island Regency Government from the overall data in this study obtained from in-depth interviews and documentation. Based on the results of the study it can be stated that the Leadership Pattern used by the Bupati on Morotai Island that the researcher analyzed was absent and the clear direction from the Bupati of Morotai Regency gave directions and requests related to the development or administration of the government in the Morotai Island Regency.*

**Keywords:** Leadership Style, Organizing, Regency of Morotai Island.

---

**PENDAHULUAN**

Sistem pemerintahan moderen yang demokratis dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Meski tidak ada satupun kesepakatan tertulis yang dibuat, namun kesepakatan itu telah dicapai karena tidak ada satu pun kelompok atau organisasi sosial politik pada bulan Mei 1998 yang tidak menginginkan (menolak) demokrasi melalui demokratisasi dan reformasi. Reformasi sistim pemerintahan secara nasional melahirkan

tatanan baru dalam sistim ketatanegaraan yang pada dasarnya memungkinkan seluruh kewenangan sosial, politik dan ekonomi tidak terpusat namun dapat ditentukan di tingkat daerah.

Untuk itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu memperhatikan aspek-aspek hubungan pemerintahan dan pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah, terdapat beberapa kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan tiga asas

pemerintahan yaitu, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak sepenuhnya diserahkan secara desentralisasi.

Pelimpahan kewenangan secara otonom diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 menekankan pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah penyelenggaraan sistem pemerintahan ditingkat daerah (provinsi, kabupaten dan kota) dilakukan.

Peran kepemimpinan menjadi penentu dalam pelaksanaan otonomi daerah guna memastikan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan bersih (*good governance* and *clean governance*) dapat terselenggara secara efektif. Menurut J. Kaloh, bahwa dalam pengembangan kemampuan kepemimpinan khususnya sumber daya aparatur dalam era otonomi daerah diperlukan pengembangan sifat-sifat sebagai berikut: *pertama*; Kemampuan untuk mengembangkan jaringan kerja sama (*network*). *kedua*; Kemampuan kerjasama (*teamwork*). dan *ketiga*; keinginan melakukan kerja yang berkualitas tinggi. Otonomi daerah menghendaki adanya peran kepemimpinan yang maksimal dalam mengembangkan daerahnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. (J.Kaloh, 2002:194).

Pelaksanaan otonomi daerah dan pola kepemimpinan adalah satu mata rantai yang tidak terpisahkan, untuk itu penerapan gaya kepemimpinan di tingkat daerah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang ideal. Dalam takaran konseptual, Kartini Kartono (2005:36-38), mengemukakan bahwa persyaratan kepemimpinan dikaitkan dengan tiga dimensi pokok; (1) kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, (2) kelebihan, keunggulan/ keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, dengan demikian orang tersebut patuh kepada pimpinan dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. (3) kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/ keterampilan teknis. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik maka pelaksanaan tata kelola pemerintahan akan

berjalan sebagaimana yang diinginkan/diharapkan.

Maxwel (1995:191), mengemukakan bahwa ciri pemimpin yang baik adalah pemimpin mampu menciptakan lingkungan yang tepat. Kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahannya. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu landasan bagi seorang pemimpin dalam suatu daerah dalam menjalankan sistem atau tata kelola pemerintahannya. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang digunakan pemimpin dalam usaha mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin dalam menjalankan fungsinya mempunyai harapan agar bawahannya dapat bergerak bersama-sama mewujudkan tercapainya tujuan organisasi dan cita-cita pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam periode waktu tertentu. Gaya kepemimpinan sebagaimana dikemukakan Inu Kencana dalam *Kepimimpinan Pemerintahan di Indonesia*, (2006), diantaranya: a. Gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan, b. Gaya otokritas dalam kepemimpinan pemerintahan, c. Gaya bebas dalam kepemimpinan pemerintahan. Menurut Rost (1993), kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) dengan tujuan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemimpin dan Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun. Kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. sedangkan menurut Kartono pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga ia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang saling berbeda-beda menuju pencapaian tujuan tertentu. (Ishak Arep dan Hendri Tanjung,

2002:235). Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. (Stephen P. Robbins, 2006:432). Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai guna tujuan yang sudah direncanakan. (Kartini Kartono, 2005:153). Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. (Veithzal Rivai, 2006:64). Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah persinggungan antar berbagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain baik individu maupun kelompok dalam skala tertentu agar tujuan dapat tercapai.

### **Gaya Kepemimpinan**

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkahlaku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain. (Harsey, 2004:29). Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi bawahannya. (Nawawi, 2003:115). Dari konsep-konsep gaya kepemimpinan di atas, dapat ditegaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan ciri dan cara yang terpraktekkan dalam sebuah kepemimpinan yang dalam takaran 'struktural bersifat memaksa' agar tujuan tercapai.

### **Klasifikasi Gaya Kepemimpinan**

Setiap pemimpin dalam level kepemimpinan apapun mempunyai model dan/atau gaya kepemimpinannya. Stephen P. Robbins, mengidentifikasi empat jenis gaya kepemimpinan antara lain: *pertama*, gaya kepemimpinan kharismatik *kedua*, gaya kepemimpinan transaksional *ketiga*, gaya kepemimpinan transformasional dan *keempat*, gaya kepemimpinan visioner. (Veithzal Rivai, 2006:67).

1. Gaya kepemimpinan kharismatik. Gaya kepemimpinan ini mengisyaratkan agar pengikut (bawahan) terpacu dengan kemampuan pemimpin ketika pengikut mengamati perilaku-perilaku tertentu pemimpin. Dari segi tipologi, pemimpin kharismatik berusaha mewujudkan atmosfer

motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi dan filosofi. Pemimpin kharismatik mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Terdapat 5 karakteristik pemimpin kharismatik;

- a. Visi dan artikulasi. Pemimpin memiliki visi ditujukan dengan sasaran ideal yang berharap masa depan lebih baik daripada status quo dan mampu mengklarifikasi pentingnya visi yang dapat dipahami orang lain.
  - b. Rasio personal. Pemimpin kharismatik bersedia menempuh risiko personal tinggi, menanggung biaya besar, dan terlibat kedalam pengorbanan diri untuk meraih visi.
  - c. Peka terhadap lingkungan. Pemimpin kharismatik mampu menilai secara realistis kendala lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat perubahan.
  - d. Kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Pemimpin kharismatik respek terhadap kemampuan bawahan dan responsive terhadap kebutuhan dan perasaan bawahan.
2. Gaya kepemimpinan transaksional. Merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Gaya kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada hubungan pemimpin-bawahan tanpa adanya usaha untuk menciptakan perubahan bagi bawahannya. Terdapat 3 karakteristik pemimpin transaksional;
- a. Imbalan kontingen: kontrak pertukaran imbalan atas upaya yang dilakukan, menjanjikan imbalan atas kinerja baik, mengakui pencapaian.
  - b. Manajemen berdasarkan pengecualian (aktif), artinya melihat dan mencari penyimpangan dari aturan dan standar, menempuh tindakan perbaikan. Manajemen berdasar pengecualian (pasif), artinya mengintervensi hanya jika standar tidak dipenuhi.
  - c. *Laissez-Faire*: melepas tanggung jawab, menghindari pembuatan/ pengambilan keputusan.
3. Gaya kepemimpinan transformasional. Merupakan pemimpin yang mencurahkan perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan dari masing-masing

- pengikut. Pemimpin transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan dengan membantu pengikut memandang masalah lama dengan cara-cara baru, dan mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya maksimal demi mencapai sasaran kelompok. Terdapat 4 karakteristik pemimpin transformasional;
- a. Kharisma: memberikan visi dan rasa atas misi, menanamkan kebanggaan, meraih penghormatan dan kepercayaan.
  - b. Inspirasi: mengkomunikasikan harapan tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan pada usaha, menggambarkan maksud penting secara sederhana.
  - c. Stimulasi intelektual: mendorong intelegensia, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara hati-hati.
  - d. Pertimbangan individual: memberikan perhatian pribadi, melayani karyawan secara pribadi, melatih dan menasehati.
4. Gaya kepemimpinan visioner berkaitan dengan kemampuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah tumbuh dan membaik dibanding saat ini. Visi ini jika diseleksi dan diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan besar sehingga bisa mengakibatkan terjadinya lompatan awal kemas depan dengan membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya.
- memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif.
- b. Fungsi konsultatif berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran serta pertanyaan dari bawahannya, mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin
  - c. Fungsi partisipasi menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompoknya memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi atau jabatan
  - d. Fungsi delegasi sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain, sesuai dengan posisi atau jabatannya, apabila diberi atau mendapat pelimpahan wewenang.
  - e. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu bahwa fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

### **Fungsi Kepemimpinan**

Fungsi kepemimpinan dalam suatu birokrasi sangat urgent dalam rangka pencapaian tujuan dalam tata kelola pemerintahan. Semuanya tak lain adalah sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. menurut Hamdani Nawawi kepemimpinan yang efektif menyebutkan ada 5 fungsi kepemimpinan yaitu:

- a. Fungsi bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu

### **Otonomi Daerah**

Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *outos* (sendiri) dan *nomos* (peraturan). Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. “Autonomia” yang berarti keputusan sendiri. (Syahda Guruh dalam Murtir Jeddawi, 2011:21). Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah. Menurut Fernandes dalam Dharma Setyawan Salam, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (Dharma Setyawan Salam, 2007:88-89).

Otonomi daerah selain secara terminologi seperti dikemukakan di atas, dalam ketentuan pasal satu angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan referensi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Josepriwu Kaho, (2004:80) mengemukakan bahwa suatu daerah disebut sebagai daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

- a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah; Urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah;
- b. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri;
- c. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
- d. Mempunya sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya. (Faktul Muin, 2014:70-71).

Otonomi daerah adalah cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Maka dengan itu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan, baik atas dasar penyerahan maupun pengakuan, atau dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah, (Bagir Manan, 1994:10). Tujuan otonomi daerah sebagaimana dikemukakan The Liang Gie (dalam Murtir Jeddawi, 2011:15) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang diantaranya sebagai berikut :

- a. Dari sudut pandang politis, otonomi daerah bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja dan untuk menarik hati rakyat untuk ikut serta dalam

pemerintahan serta melatih diri dalam mempergunakan hak demokrasinya.

- b. Dari sudut pandang teknis organisatoris pemerintahan, untuk mencapai pemerintahan yang efisien.
- c. Dari sudut kultural, untuk memperhatikan sepenuhnya kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan maupun latar belakang sejarahnya.
- d. Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, untuk supaya pemerintah dapat lebih banyak secara langsung membantu pembangunan daerah.

Tujuan lain daripada pemberlakuan konsep otonomi daerah dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah sebagai berikut: a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin membaik disemua bidang, seperti; pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan lingkup daerah yang lebih sederhana dimungkinkan pemberian pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan mudah. b. Mewujudkan keadilan nasional seperti; dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, sehingga tidak ada daerah yang dirugikan dalam menata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pertimbangan keuangan. c. Pengembangan daerah menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan diberinya kesempatan kepada setiap daerah untuk meningkatkan potensinya dan bersaing dengan daerah lainnya.

### **Kepala Daerah**

Kepala daerah diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa:

- a. Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah yang disebut kepala daerah, b. Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota, c. Kepala daerah sebagaimana yang di maksud ayat (1) dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, d. Wakil kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota, e. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Kepala daerah mempunyai tugas

dan wewenang sebagai berikut. 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, 2. Mengajukan rancangan perda, 3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, 6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Menyelenggarakan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antara tingkat dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moniter dan viska nasional, yudisisi dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antara tingkat dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah,

Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria

pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Pembagian kriteria tersebut ditetapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan keserasian dan keadilan hubungan antara tingkat dan susunan pemerintahan. (Salinan PP Nomor 38 Tahun 2007).

Pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai upaya untuk memperjelas kewenangan masing masing pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dan mengurus rumah tangganya sendiri. Secara umum berdasarkan pasal 6 ayat (1 dan 2) peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari: a. Pendidikan, b. Kesehatan, c. Lingkungan hidup, d. Pekerjaan umum; e. Penataan ruang, f. Perencanaan pembangunan, g. Perumahan, h. Kepemudaan dan olah raga, i. Penanaman modal, j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah, k. Kependudukan dan catatan sipil, l. Ketenagakerjaan, m. Ketahanan pangan, n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, p. Perhubungan, q. Komunikasi dan informatika, r. Pertanahan, s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, u. Pemberdayaan masyarakat dan desa, v. Sosial, w. Kebudayaan, x. Statistik, y. Kearsipan dan z. Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. (PP No. 38 Tahun 2007). Pembagian urusan dalam kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota merupakan batasan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang riil dan nyata, sehingga tidak adanya pengambilan urusan yang bukan dari kewenangannya dan tidak mengakibatkan konflik vertikal antara lembaga-lembaga yang ada, karena ada batasan-batasan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga. (Faktual Muin, 2014:75).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas terkait Gaya Kepemimpinan Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pulau Morotai, dalam satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan elemen terkait lainnya yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gaya Kepemimpinan Bupati Pulau Morotai Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten Pulau Morotai**

Ambar Teguh Sulistiawati (2008) mengemukakan bahwa pemimpin merupakan pribadi yang mempengaruhi, artinya pemimpin tersebut memiliki watak/karakter yang menjadi cerminan kepribadian dalam hal ini pemimpin merupakan tokoh yang sangat urgen dalam suatu organisasi. Dapat dikatakan bahwa kemajuan organisasi dapat dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola organisasi.

Secara hirarkis dalam sistim pemerintahan Republik Indonesia, pemerintah daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) adalah pemimpin tingkat menengah, karena di atasnya terdapat kepemimpinan presiden dan pembantunya, dan dibawahnya terdapat camat dan lurah/kepala desa. Masing-masing pemimpin bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus mempertanggung jawabkan tugas yang diembannya kepada pejabat yang berwenang sesuai hirarki kepemimpinan tersebut.

Setiap kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dihadapkan pada berbagai persoalan, begitu juga dengan kepala daerah (bupati) Pulau Morotai, diperhadapkan dengan berbagai keadaan dan tantangan dalam memimpin organisasi pemerintahan daerah. Keadaan dan tantangan yang dihadapi setiap kepala daerah secara umum antara lain mewujudkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagai suatu paradigma baru, yang didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang prima,

sumber alam, dan sumber keuangan, serta sarana dan prasarana yang memadai, mampu meningkatkan dan mengembangkan sistem perekonomian masyarakat melalui program dan strategi pelayanan dan pemberdayaan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, tentunya setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan yang digunakan dalam memimpin daerahnya. Penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat tentunya akan membawa kemajuan bagi masyarakat yang ada di daerah. Menyadari hal tersebut, kepala daerah, Kabupaten Pulau Morotai dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan gaya kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja bawahannya. Adapun gaya kepemimpinan bupati Kabupaten Pulau Morotai dapat diuraikan antara lain:

### **Gaya Demokratis**

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Bupati Pulau Morotai dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis yaitu gaya kepemimpinan yang dikenal pula sebagai gaya partisipatif. Gaya ini berasumsi bahwa para anggota organisasi yang ambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai suatu akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi. Pendekatan tidak berarti para pemimpin tidak membuat keputusan, tetapi justru seharusnya memahami terlebih dahulu apakah yang menjadi sasaran organisasi sehingga mereka dapat mempergunakan pengetahuan para anggotanya. Tentang gaya kepemimpinan Bupati Pulau Morotai periode 2016 – 2022 yang dianggap demokratis sebagaimana dikemukakan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pulau Morotai berikut ini.

*“Gaya kepemimpinan Bupati Pulau Morotai dapat dimasukkan sebagai kepemimpinan demokratis contohnya yaitu dalam proses kepemimpinan bapak Bupati terjun langsung kelokasi untuk melihat bagaimana kondisi daerahnya kemudian ketika ada permasalahan yang harus diselesaikan beliau langsung mengkordinasikan kepada SKPD yang terkait dan meminta masukan-masukan untuk selanjutnya mendapatkan pemecahan*

*masalah yang tepat.” (wawancara 8 April 2018)*

Tentang gaya kepemimpinan demokratis yang ditunjukkan bupati, juga dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai berikut ini:

*Sejak dilantik hingga saat ini Bupati senantiasa memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya, misalnya saja dalam bidang kesehatan dikeluarkan kebijakan pengobatan gratis menggunakan BPJS dan KIS yang berlaku untuk seluruh masyarakat Morotai. Disamping itu, bupati memberikan instruksi kepada kami di dinas kesehatan agar pelayanan kesehatan harus dilakukan secara maksimal sekalipun di pelosok desa. dengan demikian, masyarakat tanpa perlu berobat ke rumah sakit umum daerah atau RSUD.*

(wawancara 13 april 2018)

Gaya kepemimpinan bupati pulau Morotai yang dikemukakan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga di atas dengan KS (inisial) sala seorang tokoh di Kecamatan Morotai Selatan mengemukakan:

*Bupati Morotai saat ini memiliki sikap kepemimpinan yang arogan dan otoriter karena beliau menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat, contoh kebijakannya tentang ASN kemarin. Cara-cara mengelola pemerintahan seperti ini tidak dibenarkan, sebab kekuasaan bukan sebagai alat untuk menindas rakyat. Hal lain misalnya, bupati ini terlalu banyak urus bisnis di luar daerah dan tidak pernah terjun secara langsung ke desa-desa guna menampung aspirasi masyarakat.*

(wawancara 10 April 2018)

Penilaian terhadap gaya kepemimpinan bupati yang kontradiksi dengan konsep-konsep gaya kepemimpinan demokratis juga dikemukakan kedua anggota masyarakat Kecamatan Morotai Timur yang sala satu dari keduanya tergabung dalam koperasi nelayan Tuna Pasifik dan satunya bermatapencaharian sebagai nelayan tangkap. “Dalam wawancara terbuka” Tasdik Pipa dan Jainal Taitu mengemukakan:

*Harus secara jujur saya utarakan, cara-cara bupati saat ini dalam memimpin daerah ini ada baik buruknya. Program dapur sehat dan tunjangan lansia saya anggap sangat bermanfaat bagi masyarakat, tapi kebijakan lain bupati justru merugikan masyarakat khususnya*

*nelayan dalam hal pembelian ikan di SKPT yang harga perkilonya ditentukan pemerintah daerah, dan itu sangat murah menurut saya. Ini sangat merugikan masyarakat nelayan.*

*...tentang penentuan harga ikan perkilo, beberapa waktu lalu kami atas nama pengurus koperasi yang bergerak di bidang perikanan sudah sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan sebagai bentuk menindaklanjuti keluhan nelayan-nelayan yang ada di desa ini, namun pimpinan di dinas itu menyampaikan bahwa tentang penentuan harga ikan bukan kewenangan dinas, tetapi kewenangan perusahaan dalam hal ini SKPT Morotai. Nah, kalau begitu pemerintah daerah harus cari solusi tentang masalah ini sebab selain merugikan nelayan juga tidak ada efek baik buat koperasi. Artinya begini, buat apa bikin koperasi kalau segala urusan terkait pengelolaan ikan sampai di tingkat desa pun harus sesuai arahan bupati. Menurut saya ini persoalan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah.*  
(wawancara 10 April 2018)

Penilaian masyarakat terhadap gaya kepemimpinan bupati Kabupaten Pulau Morotai seperti dikemukakan di atas, dapat dianggap subjektif sebab penilaian-penilaian tersebut hanya berdasarkan aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya dan mengabaikan aspek lainnya, namun penilaian-penilaian tersebut pun dapat dibenarkan karena berdasarkan pengalaman masing-masing. Dari penyampaian informan sebagai hasil wawancara dapat ditegaskan bahwa gaya kepemimpinan Bupati Pulau Morotai Periode 2016 – 2022 menggabungkan antara gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kepemimpinan transaksional.

Gaya kepemimpinan transaksional merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Gaya kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada hubungan pemimpin dan bawahan tanpa adanya usaha untuk menciptakan perubahan bagi bawahannya. Karakteristik pemimpin transaksional adalah a. Imbalan kontingen: kontrak pertukaran imbalan atas upaya yang dilakukan, menjanjikan imbalan atas kinerja

baik, mengakui pencapaian; b. Manajemen berdasarkan pengecualian (aktif), artinya melihat dan mencari penyimpangan dari aturan dan standar, menempuh tindakan perbaikan. Manajemen berdasar pengecualian (pasif), artinya mengintervensi hanya jika standar tidak dipenuhi dan; c. *Laissez-Faire*: melepas tanggung jawab, menghindari pembuatan/pengambilan keputusan.

### **Pemberian Motivasi**

Motivasi sebagai suatu keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mempunyai energi, aktifitas atau daya gerak yang secara langsung menyalurkan perilaku terhadap tujuan. Menurut Ambar Teguh sulistiawaty (2008), motivasi sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan kepada organisasi sehingga mereka mau bekerja dengan penuh kesungguhan demi tercapainya suatu tujuan organisasi. Memotivasi merupakan tugas pimpinan dalam hal ini kepala daerah, tujuannya agar semua staf bawahannya dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan tujuan dapat tercapai. Lebih lanjut Ambar teguh mengemukakan tujuan pemimpin untuk memberi motivasi, antara lain: a. Mengusahakan agar tujuan yang telah ditetapkan sesuai apa yang ada di dalam diri seseorang, b. Mengusahakan agar perbuatan atau tindakan yang diharapkan untuk dilakukan tersebut sama dengan kemampuan seseorang, c. Jika tujuan organisasi tidak sama dengan apa yang ada dalam motif seseorang maka pimpinan akan sulit untuk memotivasi, d. Jika perbuatan, tindakan yang harus dilakukan tidak didukung oleh kemampuan yang sebanding maka pimpinan akan sulit memotivasi.

Bupati Pulau Kabupaten Morotai dalam penyelenggaraan pemerintahannya selalu memberikan motivasi kepada bawahannya, hal tersebut dapat dilihat dari 3 aspek yaitu:

1. Apresiasi, yaitu kemampuan kepala daerah untuk memberikan penghargaan kepada setiap prestasi yang dicapai oleh staf atau bawahan bahkan masyarakat;
2. Bimbingan, yaitu kemampuan kepala daerah dalam memberikan bimbingan kepada staf, bawahan atau masyarakat dan;
3. Empati, yaitu kemampuan kepala daerah dalam memberikan dukungan moral kepada staf, bawahan atau masyarakat yang mengalami musibah.

Apresiasi, bimbingan dan empati diberikan pimpinan kepada bawahan atau dengan kata lain orang-orang yang dipimpinya tidak terlepas

dari produktifitas kerja. Sikap-sikap bupati sebagaimana di atas, dipertegas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai mengemukakan bahwa:

*Dalam masa pemerintahan Bapak Bupati sering memberikan penghargaan-penghargaan berupa isentif demi menumbuhkan motivasi kerja bagi bawahannya. Contohnya saja, dalam bidang pendidikan bagi setiap guru-guru yang dianggap berprestasi dalam membangun nilai-nilai religiu bagi siswa di sekolah-sekolah khususnya SD dan SMP, maka bupati lewat dinas pendidikan memberikan insentif (wawancara, 8 April 2018)*

Dari pernyataan Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai tersebut menunjukkan bahwa Bapak Benny Laos sebagai Bupati Pulau Morotai dalam pemberian motivasi terhadap bawahannya telah melakukan berbagai kebijakan salah satunya yaitu pemberian intensif terhadap guru agama guna membangun nilai religius di bidang pendidikan. Selain itu, hal lain yang dilakukan oleh Bapak Benny Laos dalam pemberian motivasi adalah memberikan pujian atas prestasi yang telah dicapai oleh staf atau bawahannya seperti dalam kedisiplinan kehadirannya. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang mengatakan bahwa:

*Bapak Bupati biasa memberikan pujian atas prestasi yang telah dicapai oleh bawahannya serta memberikan semangat dalam menjalankan pekerjaan sebagai pelayan masyarakat demi maksimalnya kinerja dan untuk memotivasi kedisiplinan kehadiran. (wawancara, 9 April 2018)*

Dari wawancara di atas penulis melihat bahwa Bupati Kabupaten Pulau Morotai dapat memberikan motivasi kepada staf atau bawahannya agar mereka mau bekerja lebih giat dan penuh tanggung jawab.

### **Pengambilan Keputusan**

Salah satu tugas dari seorang pemimpin adalah mengambil keputusan. Dapat diartikan bahwa efektifitas seorang pemimpin yang menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintahan tidak terlalu bergantung pada keterampilan melakukan kegiatan-kegiatan teknis akan tetapi dapat tergantung terhadap kemampuannya dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan

atau digunakan untuk membuat keputusan. Begitu pula dalam tatanan pemerinthan daerah, bupati atau kepala daerah dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang baik dalam segala hal yang dihadapinya, baik untuk sebuah masalah atau sebuah kebijakan. Menurut Harbani Pasollong (2013).

Beban tugas begitu banyak dan kompleks, menyebabkan para kepala daerah sering diperhadapkan pada masalah-masalah pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang rumit dan sulit dipecahkan. Masalah-masalah tersebut yang sering menjadi beban pikiran seorang pemimpin. Dalam menjalankan pemerintahannya, Bapak Benny Laos menghindari hal tersebut dengan mengambil keputusan yang terbaik dalam setiap permasalahan yang ada. Tentunya dengan selalu membuka ruang kepada semua SKPD terkait untuk memberikan usulan di jadikan pertimbangan untuk beliau. Dan ketika ada masalah sulit beliau pecahkan, terkadang beliau berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk memecahkan masalah daerah. Dalam mengambil keputusan Bupati Pulau Morotai menjaga hubungan komunikasi yang baik antar bawahannya atau jajarannya sehingga ketika terdapat permasalahan, dapat diatasi dengan baik tanpa mengganggu proses kerja yang ada. Seperti yang disampaikan oleh sala satu ASN Kabupaten Pulau Morotai yang mengatakan bahwa :

*Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah koordinasi Bupati dan SKPD dapat dikatakan Kurang baik bahwa selama kepemimpinan bapak Bupati setiap tugas atau perintah yang di berikan mengalami permasalahan yang mendalam meskipun ada masalah itu tidak di selesaikan dengan baik hal itu dipengaruhi oleh hubungan komunikasi bapak bupati dengan bawahan atau jajarannya terjalin kurang baik maka dari itu setiap masalah tidak di atasi dan mengganggu proses kerja SKPD yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.*

( wawancara 8 April 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh camat Morotai Selatan bahwa :

*Dalam membangun komunikasi dengan SKPD berjalan kurang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan karena pimpinan dan bawahan haruslah*

*berkoordinasi dengan baik. Perilaku bupati dalam memimpin kurang bijak.*

(wawancara 9 April 2018)

Disamping mendengar aspirasi dari masyarakat dalam mengambil keputusan bupati pulau morotai juga tegas namun arogan dan otoriter dalam menegakkan aturan yang ada, Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Andi selaku tokoh masyarakat dari Kecamatan Morotai Selatan yang mengatakan bahwa :

*Bapak Bupati dalam mengambil setiap keputusan sangat tegas namun arogan dan otoriter serta tidak adanya toleransi yang diberikan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh staff maupun masyarakatnya.* (wawancara 6 April 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Morotai Timur yang mengatakan bahwa :

*Setiap pelanggaran yang ditemukan oleh Bapak Bupati baik itu disengaja maupun tidak yang disengaja yang dilakukan oleh masyarakat selalu diberi sanksi yang tegas dan arogan otoriter dari Bapak Bupati.* (wawancara 6 April 2018)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Bupati Pulau Morotai dalam memimpin mempunyai karakter yang tegas namun otoriter dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai dan penulis berpendapat bahwa Seorang pemimpin selalu dituntut agar mampu tegas namun ketegasannya haruslah sesuai dengan koridor dalam mengambil keputusan disamping ketegasannya juga dituntut untuk cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan yang tidak menyengsarakan stafnya atau pun masyarakat. Karena terkadang ada permasalahan yang kondisinya sangat mendesak untuk di selesaikan.

### **Fakto-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Bupati Pulau Morotai**

Pada dasarnya suatu tata pemerintahan daerah selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitupun dengan gaya kepemimpinan kepala daerah yang selalu dipengaruhi oleh banyak hal dalam menjalankan pemerintahannya. Bupati atau kepala daerah merupakan orang yang selalu menjadi fokus oleh semua staf-staf yang ada diberbagai instansi. Olehnya itu seorang Bupati atau kepala daerah selalu dituntut agar mampu menjadi pemimpin yang terampil

mempengaruhi bawahannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bapak Benny Laos yang merupakan Bupati atau kepala daerah di Kabupaten Pulau Morotai berupaya menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya dengan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta merencanakan beberapa program yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.

### **Kemampuan/Skill**

Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kepemimpinan dan ilmu tentang ruang lingkup kerja profesinya yang terdiri dari pengetahuan kognitif maupun skill/keterampilan. Seorang pemimpin akan dihadapkan pada situasi tertentu dimana dia harus mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat adalah pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki. Bapak Benny Laos sebagai Bupati Pulau Morotai dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, yang mampu membawa Kabupaten Pulau Morotai kearah yang lebih baik, seperti yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kadispora Kabupaten Pulau Morotai yang mengatakan bahwa :

*kepemimpinan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu mendorong semua dinas dan lembaga pemerintahan bagaimana membangun sektor yang mampu membawa Kabupaten Pulau Morotai lebih baik dalam bidang pendidikan selama dua tahun kepemimpinan beliau membangun atau merenovasi kembali beberapa sekolah dan mengadakan perampingan sekolah demi kepentingan pembangunan sekolah unggulan, dan untuk daerah yang sulit dijangkau atau yang mempunyai jarak yang cukup jauh dari pemukiman penduduk kesekolah itu dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah selain dari itu untuk meningkatkan atau membangun semangat anak-anak dalam menuntut ilmu bapak bupati melalui dinas pendidikan memberikan buku tulis gratis untuk semua anak SD yang ada di kabupaten pulau morotai*

(wawancara 8 April 2018).

Prestasi lain yang dilakukan oleh Bapak Benny Laos untuk Kabupaten Pulau Morotai

adalah menjadikan Kabupaten Pulau Morotai sebagai satu-satunya daerah yang menyatukan pelayanan publik yang mempermudah masyarakat dalam mengurus KTP atau perizinan tatkala pentingnya, selain itu animo para calon investor sangat tinggi karena di Kabupaten Pulau Morotai di sediakan paket investasi sehingga para calon investor berlomba-lomba untuk masuk. Bupati Pulau Morotai juga dikenal dengan sikapnya yang merakyat dan tanpa sungkan terjun langsung kepada masyarakat untuk mengetahui keadaan dan setiap permasalahan yang dimiliki masyarakatnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdullah selaku Tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Morotai Utara yang menyatakan bahwa :

*Selama kepemimpinan Bapak Benny Laos selalu memantau masyarakatnya secara langsung serta selalu menyelesaikan setiap masalah yang dialami oleh masyarakatnya*

(wawancara 11 April 2018)

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Amiruddin selaku tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Morotai Utara yang mengatakan bahwa :

*Bapak Benny Laos memiliki sikap yang tidak merakyat dan tidak terjun langsung kepada masyarakatnya kemudian tidak mengetahui secara pasti keadaan setiap masyarakatnya.*

(wawancara 11 April 2018)

### **Pengalaman kerja**

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa SKPD dan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, salah satu faktor yang dianggap berpengaruh dalam gaya kepemimpinan Bupati Kabupaten Pulau Morotai adalah pengalaman kerja. Hal tersebut dianggap mampu menjadi pengaruh yang cukup signifikan bagi Bapak Benny Laos mengingat bahwa beliau adalah seorang pengusaha sukses di Provinsi Maluku Utara dan pernah bertarung sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara, tentulah banyak pengalaman yang dapat menjadi rujukan dalam menjadi Bupati. Benny Laos sebagai Bupati di Kabupaten Pulau Morotai pasti menjadikan pengalamannya sebagai pengusaha untuk memimpin Kabupaten Pulau Morotai yang lebih baik dan lebih maju. Sejalan dengan hal itu, Camat Morotai Selatan juga menambahkan pengalaman kerja Bapak Bupati berpengaruh dengan gaya kepemimpinannya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Beliau menjelaskan karena sbelumnya Bapak Bupati

pernah memimpin perusahaan yang ada di Maluku Utara sehingga hal tersebut berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.

### Lingkungan Kerja

Lingkungan merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam diri manusia, terkadang pembentukan karakter dapat terjadi akibat pengaruh lingkungan dimana seorang mendapatkan kehidupan. Begitupun dengan seorang pemimpin. Dimana gaya kepemimpinannya dapat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia bekerja. Gaya kepemimpinan Bapak Benny Laos selaku Bupati di Kabupaten Pulau Morotai juga tak lepas dari pengaruh lingkungan pemerintahan yang mengedepankan bagaimana pelayanan masyarakat dapat terpenuhi semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana yang diketahui bahwa bupati yang berasal dari lingkungan pemerintahan itu sendiri meski dari lingkup kecamatan tentunya membawa pengaruh dalam gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Kepala dinas kesehatan mengatakan bahwa:

*Lingkungan kerja bapak bupati dari seorang pengusaha tentulah membawa pengaruh terhadap gaya kepemimpinannya dimana pada saat menjabat sebagai bupati beliau harus mengatur bawahan serta masyarakat demi terselenggaranya organisasi yang baik.*

(wawancara 13 april 2018)

Lebih lanjut sekretaris daerah Kabupaten Pulau Morotai menambahkan bahwa background seorang pemimpin yang telah ada dalam diri beliau yang selalu berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dari tingkat kecamatan jelas bahwa lingkungan kerja berpengaruh dalam penerapan gaya kepemimpinannya.

### KESIMPULAN

Secara garis besar beberapa perilaku bapak Benny Laos dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai mengarah kedalam ciri-ciri pemimpin yang demokratis. Mulai dari pengambilan keputusan dan pemberian motivasi. Hal tersebut tentunya tak lepas dari kemauan dan usaha beliau dalam proses penyelenggaraan kepemimpinan. Adapun yang dapat disimpulkan sesuai dengan

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan Bupati Pulau Morotai yakni Benny Laos adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Dimana sesuai dengan beberapa indikator yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Pemberian motivasi Dalam pelaksanaan pemerintahannya bapak Benny Laos selalu memberika penghargaan atau insentif kepada pihak yang berprestasi dan yang bekerja maksimal serta jiwa kepedulian sosial beliau kepada bawahan dan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.
  - b. Pengambilan keputusan: Keterbukaan bapak Benny Laos dalam menerima saran atau ide dari SKPD atau pejabat-pejabat dan masyarakat yang terkait dalam pemerintahannya dan kemampuannya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi.

Berangkat dari indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bapak Benny Laos menganut gaya kepemimpinan demokratis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai. Dimana beliau selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan di setiap fenomena pemerintahan.

1. Faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai antara lain:
  - a. Kemampuan/skill: Selama pemerintahannya, Bapak Benny Laos selalu berupaya menempatkan pejabat sesuai dengan disiplin ilmunya dan kemampuannya untuk komitmen dalam menjalankan visi dan misi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai.
  - b. Lingkungan kerja hal ini merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi gaya kepemimpinan Benny Laos mengingat bahwa pengalaman lingkungan yang ada di pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai tentunya dalam penyelenggaraan pemerintah.

### DAFTAR PUSTAKA

*Kencana, Inu, (2006).Kepimimpinan Pemerintahan Di Indonesia. Bandung. Refika Adiyatma*

- Kencana, Inu, (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Nashori, Fuad, (2009). *Psikologi Pemerintahan*. Yogyakarta. Pustaka Fahima Pasolong
- Harbani, (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung. Alfabeta
- P.Siagian, Sondang, (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta, Pt rineka cipta
- Santoso, gempur.2005. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Surabaya, Prestasi pustaka
- Teguh, Ambar. 2008. *Kepemimpinan Profesional ( Pendekatan Leadership Games )*. Yogyakarta: Gaya Media
- Tambunan, Emil H, (2011). *Kepemimpinan dan liku-likunya*. Jakarta. Arvico Thoha, Mifta.
2013. *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada.
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.  
<https://felixdeny.wordpress.com/2012/01/07/definisi-kepemimpinan-dan-macam-macam-gaya-kepemimpinan/>  
<http://www.e-jurnal.com/2013/09/fungsi-fungsi-kepemimpinan.html>  
[http://putuakfat.blogspot.com/2011/03/gaya-kepemimpinan-manajemen kesehatan.html](http://putuakfat.blogspot.com/2011/03/gaya-kepemimpinan-manajemen-kesehatan.html)  
<http://www.pinrangkab.go.id/post/read/58/bupati-wakil-bupati.html>
- J. Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta.
- Creswell John. W., (2010), *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ketiga (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murtir Jeddawi, Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011. Hlm. 21.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994. Hlm. 10.
- Salinan Pasal 1 huruf h UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
<file:///C:/Users/FISIPOL/Downloads/KONSEP%20OTONOMI%20DAERAH.pdf>
- Dharma Setyawan Salam, 2007, Otonomi daerah dalam perspektif lingkungan, nilai dan sumberdaya, Jakart: Djembatan
- Menurut Josepriwu Kaho, prospek otonomi daerah di negara republik indonesia (identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya), (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 80.
- (Faktul Muin dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No 1, 2014)
- Penjelasan PP Nomor 38 TAHUN 2007 Tentan Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota